

ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun
2016-2018)



Oleh :

MARDIATUS SOLIKAH

16310198

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDIKA
SURABAYA**

2020

Analisa Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

Mardiatus Solikah
STIE Mahardhika Surabaya
Email: Mardiaikah2@gmail.com
Jl. Wisata Menanggal No.42 A Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh komite audit, kualitas audit dan kompensasi eksekutif terhadap peluang terjadinya *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan dalam sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengujian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari total 47 perusahaan sector pertambangan hanya ada 7 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian ini dengan jumlah 39 data yang dapat diolah. Dengan hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial menunjukkan bahwa kualitas audit, kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *tax*

Keywords: *tax avoidance, audit committees, audit quality, compensation*

Pendahuluan

Perusahaan merupakan badan wajib pajak terbesar yang mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan kas Negara. Perusahaan wajib membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Pajak perusahaan sangat berperan penting dalam mendorong perekonomian Negara, sedangkan bagi perusahaan akan dianggap sebagai beban pengurang laba. Maka dari itu tak jarang perusahaan-perusahaan dalam skala besar maupun dalam skala kecil melakukan praktik penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) dengan cara tetap menaati peraturan undang-undang dan mencari celah kelemahan peraturan perpajakan yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak. Pihak eksternal dan internal perusahaan memainkan *corporate governance*

perusahaan untuk mengelolah laporan keuangan perusahaan (Silvia Amalia dan Aditya Septiani, 2018).

Corporate governance merupakan hal utama yang sangat berpengaruh besar dalam pendapatan laba suatu perusahaan. Dalam penerapannya, *corporate governance* dapat meminimalisir manajemen yang tidak efektif sehingga dapat menghindari kerugian dalam perusahaan. Selain itu tujuan dari *corporate governance* ialah untuk menciptakan kestabilan perusahaan sehingga dapat mencapai dan meningkatkan kemakmuran akuntabilitas perusahaan, mewujudkan *shareholders value*, serta terciptanya arah kinerja perusahaan yang lebih baik.

Komite audit dalam perusahaan bertugas untuk megawasi jalannya perusahaan dan mengawasi pengauditan laporan keuangan. Adanya komite audit dalam perusahaan dapat memperbaiki kesalahan laporan keuangan agar laporan keuangan memuat informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kepada dewan komisaris (Linda dkk, 2011 dalam Fitri Damayanti,2015).

Kualitas audit merupakan semua hasil yang ditemukan oleh auditor dari laporan klien termasuk juga pelanggaran yang terjadi kemudian melaporkannya dalam laporan auditnya. Dalam melakukan audit sangat diperlukan sikap transparansi. Adanya kualitas audit dalam perusahaan dapat mengoptimalkan tingkatan transparansi informasi perusahaan untuk pelaporan audit tahunannya.

Dewan komisaris independent dalam suatu perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi manajemen pajak. Adanya dewan komisaris dalam perusahaan dapat meminimalkan tingkat keagresifan pajak perusahaan melalui pengawasan dan berpendapat atau nasehat yang diberikan.

Kompensasi eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan kepada manajemen perusahaan. Biasanya diberikan dalam bentuk imbalan berupa uang. Adanya kompensasi dapat mempengaruhi peningkatan pengawasan efektifitas untuk mematuhi peraturan perusahaan. karena semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka npihak manajemen perusahaan akan semakin berhati-hati untuk mengambil keputusan (zhou dalam Rahardian Nugroho, 2019).

Kepemilikan institusional merupakan jumlah prosposisi saham yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, pemerintah, investor luar negri, bank. Adanya kepemilikan institusional di perusahaan akan mendorong peningkatan system pengawasan secara optimal terhadap

kinerja manajemen, karena kepemilikan saham memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Arry Eksandy, 2015).

Kepemilikan saham publik merupakan jumlah saham yang beredar secara aktif untuk diperjual belikan. Saham publik dapat menambah pemasukan dana, memperbaiki citra perusahaan dan menambah peningkatan skala usaha perusahaan . Secara tidak langsung adanya saham publik sangat mempengaruhi mempengaruhi tingkatan motivasi untuk melakukan penghindaraan pajak dalam perusahaan.

Periode penelitian adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menggunakan data perusahaan yang terbaru sehingga data tersebut dapat merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan saham publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2016-2018.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Dalam teori keagenan, hubungan antara principal dan agent dapat mempengaruhi kondisi *asymmetrical information* (ketidakseimbangan informasi) karena posisi agent yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan diban diinginkan degan principal. Agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan didalam laporan keuangan dengan cara memanajemen laba.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan masalah yang sering terjadi dalam pemungutan pajak yang berakibat berkurangnya pemasukan kas Negara.

Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang legal. Disebut legal karena proses meminimalkan beban pajak dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan penyeludupan pajak atau tax evasion atau fraud merupakan kegiatan penghindaran pajak yang illegal, karena praktik ini meminimalkan beban pajak dengan cara memanipulasi catatan pembukuan perusahaan (Fadhila, 2015).

Corporate Governance

Menurut Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (dalam Hery, 2010:22) mendefinisikan *Corporate Governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Puspita (dalam Sri Mulyani dkk, 2018) menjelaskan bahwa peranan *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam komite audit telah menjadi bagian komponen umum dalam struktur *corporate governance* (CG) perusahaan publik. Komite audit adalah salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang memengaruhi secara signifikan dalam menentukan kebijakan suatu perusahaan.

Hasil dari penelitian dari Sri Mulyani, Anita Wijiyanto, Endang Masintosh (2018), Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012) serta Muhammad Otafian (2015) menunjukkan hasil bahwa komite audit berperan positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sehingga dapat dijadikan hipotesis dalam penelitian ini.

Pengaruh kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Chai dan Liu (dalam Sri Mulyani dkk, 2018) mengungkapkan bahwa perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya memberikan hasil bahwa kualitas audit yang lebih baik akan membantu meminimaliskan praktik penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak akan melakukan praktik manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijiyanto, Endang Masintosh (2018) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berperan positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Jensen dan Meckling (dalam Sri Mulyani dkk, 2018) dalam teori keagenan mengutarakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris independen, maka akan semakin baik sistem pengawasan dan pengontrolan tindakan-tindakan yang manajer lakukan. kesimpulan dari teori keagenan menyatakan bahwa komisaris independen sangat dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk membantu mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer lakukan, seperti perilaku oportunistik mereka yakni kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan material maupun nonmaterial yang akan diberikan kepada eksekutif dengan maksud memotivasi karyawannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kompensasi eksekutif sering digunakan untuk memecahkan masalah kepentingan manajerial (agen) dengan pemegang saham.

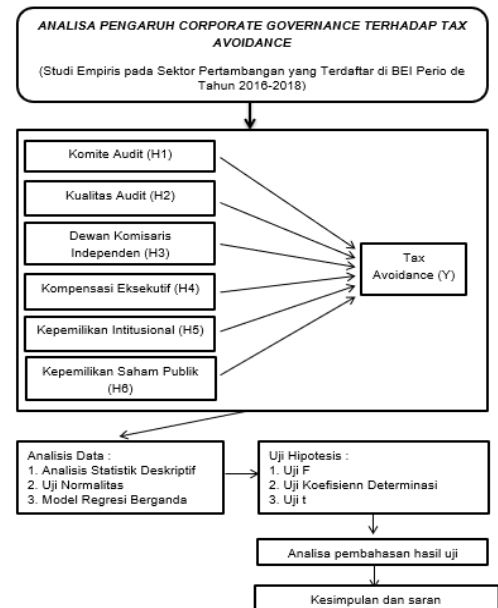
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Fadhilah (dalam Putu Rista dan IGK Agung, 2016) menjelaskan definisi dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh instusi dari pendiri perusahaan dan bukan intitusi pemegang saham publik yang diukur menggunakan jumlah saham inverstor institusi. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (dalam Putu Rista dan IGK Agung, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran aktif dalam hal mengawasi kinerja manajer suatu perusahaan dan memaksa manajer untuk berhati-hati mengambil keputusan yang oportunistik. Tingginya kedudukan kepemilikan institusional akan mempengaruhi tingkat pengawasan kepada manajer perusahaan dan dinalai dapat mengurangi konflik yang mungkin terjadi antara manajemen dengan keagenan. Sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya praktik tax avoidance.

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Tax Avoidance

Silvia dan Puji (dalam Elna Arlina, 2014) mengatakan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan public maka bisa dikatakan bahwa kosentrasi kepemilikan perusahaan tersebut dalam posisi lemah, dan sistem tata kelolah perusahaan tersebut dinilai masih sangat kurang baik. Kepemilikan publik memiliki karakteristik perusahaan yang mengharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Semakin besar kepemilikan saham publik dalam perusahaan, maka tingkat praktik penghindaran pajak disuatu perusahaan akan semakin rendah.

Berikut adalah kerangka pemimikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

Hipotesis Penelitian

Ha1 : komite Audit dapat mempengaruhi Tax Avoidance

Ha2 : Kualitas Audit dapat mempengaruhi Tax Avoidance

Ha3 : Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi Tax Avoidance

Ha4 : Kompensasi Eksekutif dapat mempengaruhi Tax Avoidance

Ha5 : Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi Tax Avoidance

Ha6 : Kepemilikan Saham Publik dapat mempengaruhi Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Rencana Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dengan tipe kuantitatif, data dalam satuan numerik, bersifat bulat atau pecahan dan interval. Data yang didapat bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang menerbitkannya dan siap untuk digunakan (Tony Wijaya, 2013:19).

Identifikasi Variabel

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Variabel terikat dalam penelitian

ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan, variabel bebas dalam penelitian ini adalah *corporate governance*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Tax Avoidance

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. *Tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan masih dalam bingkai peraturan pajak. Penelitian ini menggunakan perhitungan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dengan harapan dapat mengidentifikasi keagresifan sistem pengelolaan pajak dalam suatu perusahaan. CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yakni kas yang dikeluarkan perusahaan sebagai biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Berikut adalah rumus dari untuk perhitungan CETR:

$$CETR = \frac{CashTaxPaid}{Pre-taxincome}$$

Keterangan :

CETR : Cash Effective Tax Rate

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre-tax income : Laba sebelum pajak

Variabel Independen Komite Audit

Komite audit adalah sebuah badan atau komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, dimana anggota Komite Audit di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Tugas dari Komite audit ialah membantu melaksanakan pemeriksaan fungsi direksi dalam menjalankan atau mengelola perusahaan (Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018). Untuk mengukur komite audit data menggunakan rasio sebagai berikut:

$$KMA = \frac{Jumlahanggotadewankomiteauditdariluar}{Jumlahseluruhanggotakomiteaudit}$$

KMA melambangkan Komite Audit.

Variabel Independen Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan segala sesuatu hasil dari laporan keuangan pengauditan yang terdapat masalah atau pelanggaran maupun yang tidak terdapat masalah atau pelanggaran yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Dalam penelitian inii variabel independen kualitas audit diukur dengan menggunakan proksi KAP *four* dan KAP *non-Big*. Kualitas audit juga diukur dengan menggunakan skala nominal melalui variabel *dummy* yakni variabel independen dalam bentuk skala non-metrik atau kategori. Penggunaa angka 1 dilambangkan sebagai perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka dilambangkan sebagai perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four*. Sedangkat audit tetap dalam kata audit.

Variabel Independen Komisaris Independen

Adanya dewan komisaris independen sangat berperan positif terhadap kinerja perusahaan, dan untuk pengembangan nilai perusahaan. Karena komisaris independen memiliki peran sebagai pengawas sehingga dapat membatasi peluang-peluang kemungkinan terjadinya kecurangan pada pihak manajemen. Dewan komisaris independen juga dapat membatu memberikan arahan bagaimana mengelola perusahaan serta merumuskan bagaimana strategi perusahaan yang lebih baik. Termasuk juga dalam menentukan kebijakan tarif pajak efektif yang akan dibebankan perusahaan (Putu Rista Diantar dan IGK Agung Ulupui, 2016). Dalam penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang mengungkan bahwa komisaris independen memberi pengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Dewan komsaris Iependen dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{Jumlahanggotadewankomisarisdailuarperusahaan}{Jumlahanggotadewankoisarisperusahaan}$$

KI melambangkan Dewan Komisaris Independen.

Variabel Independen Kompensasi Eksekutif

Kompensasi ialah bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk finansial maupun barang sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elna Arlina (2014), Kompensasi independen diukur menggunakan logaritma 10 total kompensasi setahun yang didapatkan komisaris dan direksi. Kompensasi eksekutif dapat dilambangkan dengan **KE**.

Variabel Independen Kepemilikan Institusional

Tryas Chasbiandani, Triastuti, Sri Ambarwati (2019) Menyatakan bahwa kepemilikan Institusional merupakan saham milik investor luar perusahaan seperti pemerintah, perusahaan investasi, investor luar negeri dan bank yang dapat membantu tugas pihak prinsipal yakni mengontrol perilaku agen dalam perusahaan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Maka dari itu pihak luar perusahaan dapat berperan penting untuk mengawasi pihak agen yang juga memiliki peran untuk mengawasi tugas manajer perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin berpengaruh besar dalam upaya praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini kepemilikan diukur dengan menggunakan rasio presentasi sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Proporsisaham dimiliki institusi}}{\text{Jumlahsahamyangditerbitkan}}$$

Kepemilikan institusional dapat dilambangkan dengan **INST**.

Variabel Independen Saham Publik

Kepemilikan saham publik dapat didefinisikan sebagai tingkat konsentrasi kepemilikan saham utama yang diutamakan memiliki minimal 5% saham

kepemilikan dari total saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan saham alam penelitian ini diukur dengan presentase. Dengan rasio kepemilikan saham publik dibagi dengan total saham beredar. Kepemilikan saham publik dilambangkan dengan **PUB**.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2018. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Menggunakan laporan keuangan tahunan selama periode tiga tahun berturut-turut yakni dalam periode 2016 sampai 2018 yang digunakan selama penelitian. Laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) ataupun dari situs resmi perusahaan.
2. Menyajikan laporan keuangan tahunan menggunakan nilai mata uang Rupiah.
3. Laporan tahunan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember untuk menjaga keseimbangan sampel.
4. Menggunakan dan memilih laporan keuangan dalam sektor pertambangan arena sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang kas Negara terbesar dan juga tidak luput dari banyaknya masalah.
5. Perusahaan sektor pertambangan pada periode penelitian (2016 sampai 2018) mengalami naik turun laba yang cukup drastis.
6. Perusahaan sektor pertambangan memiliki data yang dibutuhkan penelitian selama 3 (tiga) tahun, yakni meliputi :
 - Presentase komisaris independen

- Jumlah kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi perusahaan
- Memiliki perhitungan rekonsiliasi fiskal
- Terdapat struktur pemegang saham
- Menampilkan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang dijabarkan sebelumnya, perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian adalah sebanyak 7 perusahaan dengan 54 data Rincian mengenai pengurangan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

METODE PEMILIHAN SAMPEL PENELITIAN

Keterangan	Perusahaan	Periode	Jumlah Data
Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	47	3	141
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya selama tahun 2016-2018	(31)	3	(93)
Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami Kerugian	(2)	3	(6)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut – turut pada periode 2016-2018	(1)	3	(3)
Jumlah data pengamatan selama delapan tahun	7	3	39
Jumlah sampel outlier			(0)
Total data yang digunakan			39

Sumber data : diolah

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASA

Analisis Deskriptif

Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 2

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	21	.0003	35.385	.473376	.7230081
KMA	21	0	1	.37	.300
AUDIT	21	0	1	.43	.507
KI	21	.2500	.5000	.419841	.0795157
KE	21	89.878	110.015	10.205.424	.5495337
INST	21	.0394	.9421	.548723	.2356916
PUB	21	.0579	.5527	.331867	.1352431

Sumber data : diolah

Pada penelitian ini *tax avoidance* dihitung dengan cara CETR (*cash effective tax rate*). CETR (*cash effective tax rate*) dalam perusahaan diukur dari beban pajak dibandingkan laba sebelum pajak. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat *tax avoidance* yang diprosikan melalui CETR memiliki nilai minimum sebesar 0,0003 dan nilai maksimum sebesar 3,5285, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,473376. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai CETR diatas nilai rata-rata diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih rendah karena beban pajaknya lebih besar dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Perusahaan sampel yang memiliki nilai CETR diatas nilai rata-rata sebanyak 4 perusahaan atau 19,05% dari total sampel. Nilai CETR tertinggi dimiliki oleh PT RATU PRABU ENERGI Tbk dengan nilai CETR sebesar 3,528459 atau 352,84% pada tahun observasi 2016. Sedangkan perusahaan sampel yang memiliki nilai CETR dibawah nilai rata-rata sebanyak 17 perusahaan atau 80,95% dari total sampel. Nilai CETR terendah dimiliki oleh PT TIMAH (Persero) Tbk dengan nilai sebesar 0,0003 atau 0,03% pada tahun observasi 2016. Perusahaan yang memiliki nilai CETR dibawah nilai rata-rata diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih tinggi karena beban pajaknya lebih rendah dengan dibandingkan laba sebelum pajaknya. Tabel diatas juga menjelaskan nilai standar

deviasi sebesar 0,7230081. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa standar error dari variabel tersebut besar.

Komite audit (KMA) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio dari presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan komite audit dari luar perusahaan (komite audit independen) selama tiga tahun periode pengamatan dengan sampel (N) sebanyak 21 data laporan perusahaan sektor pertambangan yang memiliki nilai minimum sebesar 0 dimiliki oleh PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk pada periode tahun 2016, PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk pada periode tahun 2016 dan PT ELNUSA Tbk pada periode tahun 2016 hingga 2018. Nilai maksimum sebesar 1 dimiliki oleh PT RATU PRABU ENERGI Tbk pada tahun observasi 2017 dan 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,37 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,300.

Kualitas audit merupakan tingkat independensi dari keahlian yang dimiliki auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit diukur menggunakan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk melambangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk melambangkan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four*. Nilai minimum kualitas audit sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,43, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,507.

Dewan komisaris independen (KI) diukur dari jumlah persentase dewan komisaris independen perusahaan dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dari tabel diatas, pada variabel KI diketahui bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan Bursa

Efek Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen yang menunjukkan nilai minimal 0,25 atau 25%. Nilai minimal 0,25 dimiliki oleh PT CITATAH Tbk pada tahun observasi 2018. Nilai maksimum sebesar 0,5 dimiliki oleh PT RATU PRABU ENERGI Tbk pada tahun observasi 2016 hingga 2018, PT TIMAH (Persero) Tbk pada tahun observasi 2016 hingga 2017, PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk pada tahun observasi 2016 hingga 2017 dan PT ANEKA TAMBANG Tbk pada tahun observasi 2017 hingga 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,419841, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0795157. Nilai rata-rata variabel KI sebesar 0,419841 atau 41,98% mengindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi batas minimal dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30%.

Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan logaritma 10 total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi. Pada tabel kompensasi eksekutif (KE) terendah sebesar 8,9878 yang merupakan nilai logaritma 10 dari total kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi selama satu tahun Rp 972.398.650,- dari PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 sedangkan kompensasi eksekutif (KE) tertinggi sebesar 11,0015 yang merupakan nilai logaritma 10 dari total kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi selama satu tahun Rp 100.353.000.000 dari PT. Bukit Asam (Persero) Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata sebesar 10.205424 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memberikan nilai kompensasi eksekutif yang cukup tinggi. Tingginya kompensasi eksekutif mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut bagus serta perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan laba. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat memotivasi pihak

eksekutif untuk memaksimalkan kinerja mereka guna meningkatkan laba perusahaan. Standar deviasi 0,5495337 dengan nilai rata-rata 10,205424 menunjukkan bahwa sebaran data kurang merata. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh homogen.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham yang beredar. Dari hasil analisa diskriptif yang terlihat didalam tabel kepemilikan institusional memiliki rata-rata 0,548723 dengan standart deviasi sebesar 0,2356916 bisa diartikan bahwa rentang atau jarak antara data satu dengan lainnya adalah sebesar 0,312807. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,548723 atau 54,87%. Hal ini berarti 54,87% saham yang beredar dalam perusahaan dimiliki oleh pihak institusional perusahaan sisanya 45,13% dimiliki oleh pihak internal perusahaan atau masyarakat (publik). Standart deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi dari kepemilikan institusional terbilang rendah dengan nilai minimum 0,0394 berasal dari PT TIMAH (Persero) Tbk pada tahun observasi 2017 sedangkan nilai maksimum 0,9421 berasal dari PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk pada tahun observasi 2016. Variasi data dari kepemilikan institusional dapat dinyatakan rendah karena standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata. Tingginya kepemilikan institusional menunjukkan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh institusi dan dapat dikatakan pengawasannya juga semakin ketat.

Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dengan total saham yang beredar. Dari hasil analisa diskriptif yang terlihat didalam tabel 4.13 nilai minimum variabel kepemilikan saham publik (PUB) sebesar 0,0579 dimiliki oleh PT BUKIT ASAM

(PERSERO) Tbk pada tahun observasi 2016 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,5527 dimiliki oleh PT RATU PRABU ENERGI Tbk pada tahun observasi 2017 dan 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,331867 menunjukkan bahwa presentase yang dimiliki publik cenderung rendah. Kepemilikan publik yang lebih rendah menunjukkan bahwa ruang gerak pihak manajemen semakin luas dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap pihak manajemen lebih rendah, dengan begitu peluang kecurangan yang mungkin akan dilakukan pihak manajemen semakin besar. Rendahnya nilai presentase kepemilikan saham publik tersebut dapat dipicu dari kinerja perusahaan, semakin rendah kinerja perusahaan maka akan berdampak pada semakin rendahnya ketertarikan investor untuk bekerjasama pada perusahaan tersebut. serta nilai standar deviasi sebesar 0,1352431.

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui normal tidaknya model regresi, variabel independen, variabel dependen, dan juga data sampel yang di analisis. Dalam penelitian ini uji normalitas diuji dengan menggunakan rasio *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan hasil uji data signifikansi alpha 5%. Jika nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 maka data bernilai berdistribusi normal. Dan jika shasil signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 makan data bernilai tidak berdistribusi normal.

Tabel 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.42916391
Most Extreme Differences	Absolute	.190
	Positive	.097
	Negative	-.109
Test Statistic		.498
Asymp. Sig. (2-tailed)		.965
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

sumber data : diolah

Perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 7 perusahaan, dalam jangka waktu 3 tahun maka diperoleh data sebanyak 21. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil tampak pada table 4.13 menunjukkan hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,965 lebih besar dari 0.05 maka data dinyatakan normal.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4

Tabel Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.771	3.637		4.336	.001
	KMA	-.124	.291	-.087	-.425	.677
	AUDIT	-1.622	.554	-.673	-2.929	.011
	KI	2.190	1.652	.241	1.326	.206
	KE	-1.471	.322	-1.118	-4.562	.000
	INST	-2.927	1.147	-.548	-2.552	.023
	PUB	.755	.666	.246	1.135	.276

a. Dependent Variable: CETR

Sumber data : diolah

Berdasarkan dari hasil uji diatas, maka dapat dijelaskan bahwa komite audit, komisaris independent, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap adanya tax avoidance. Karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,005 yaitu dengan masing-masing tingkat

signifikasinya ialah 0,677, 0,206, 0.023, dan 0,276. Sedangkan audit dan kompensasi eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap adanya tax avoidance berdasarkan hasil uji tersebut dengan hasil tingkat signifakannya masing-masing sebesar 0,011, dan 0,000 (tidak lebih dari 0,005).

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^{a,b}				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.497	

a. Predictors: (Constant), INST, KE, KI, AUDIT, PUB, KMA
b. Dependent Variable: CETR

Sumber data : diolah

Diperoleh Nilai *R-Squared* (koefisien determinasi) = 0,648, nilai ini menunjukkan kemampuan variable terikat dalam mempengaruhi variabel bebas adalah sebesar 0,648. Ini berarti bahwa *tax avoidance* mampu dijelaskan oleh variabel Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Saham Publik sebesar 64,8%. Sedangkan sisanya sebesar 35,2% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 6

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	6.771	6	1.1289	4.289	.012 ^b
	Residual	3.684	14	.263		
	Total	10.455	20			

a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), INST, KE, KI, AUDIT, PUB, KMA

Sumber data: diolah

Berdasarkan dari hasil uji statistik f, nilai f hitung diperoleh 4,289 dengan tingkat signifikannya sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa variable independen dapat menjadi variable penjelas dari variabel dependen karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterimayang artinya komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independent, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun periode 2016-2018.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t pada berguna untuk menunjukkan bagaimana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang signifikan secara parsial antara komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan membandingkan nilai signifikannya dengan (α) = 5%. Dinyatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikan uji t $\leq 0,05$ dan dikatakan tidak berpengaruh jika nilai signifikan uji t lebih dari 0,05.

Tabel 7

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			T	Sig.	Kesimpulan
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta			
	B	Std. Error				
(Constant)	15.771	3.637		4.336	.001	
KMA	-.124	.291	-.087	-.425	.677	H ₀ 1 ditolak
AUDIT	-1.622	.554	-.673	-2.929	.011	H ₀ 2 diterima
KI	2.190	1.652	.241	1.326	.206	H ₀ 3 ditolak
KE	-1.471	.302	-1.118	-4.562	.000	H ₀ 4 diterima
INST	-2.927	1.147	-.548	-2.552	.023	H ₀ 5 diterima
PUB	.755	.666	.246	1.135	.276	H ₀ 6 ditolak

a. Dependent Variable: CETR

Sumber data : diolah

Pengaruh Komite Audit (KMA) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi untuk variabel Komite Audit (KMA) diketahui bahwa koefisien regresi bernilai negatif sebesar 0,0124. Hasil uji t untuk variabel Komite Audit diperoleh nilai -0,425 dengan tingkat signifikansi lebih besar dibandingkan taraf signifikansi yang ditetapkan ($0,677 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan kurang optimalnya peran komite audit dalam keikutsertaan pengambilan keputusan. Dan kurang optimalnya sistem pengawasan yang dapat diberikan oleh komite audit terhadap manajemen perusahaan. Karena pengambilan keputusan dan pengawasan manajemen perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh dewan komisaris perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Adhelia dengan judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)” dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Komite Audit tidak berperan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit (AUDIT) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi untuk variable Kualitas Audit diketahui bahwa koefisien regresi bernilai negatif sebesar 1,622. Hasil uji t untuk variabel Kualitas Audit diperoleh nilai -2,929 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yang ditetapkan ($0,011 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hal ini dikarenakan auditor oleh KAP BIG FOUR hanya terfokus pada audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standart akuntansi keuangan dan dapat mengetahui adanya kecurangan didalam salah satunya pajak dan upaya penghindarannya (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Amalia dan aditya Septian (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015”.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen (KI) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi untuk variabel Dewan Komisaris Independen diketahui bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 2,190. Hasil uji t untuk variabel Dewan Komisaris Independen diperoleh nilai 1,326 dengan tingkat signifikan lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan ($0,206 > 0,05$). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dikarenakan kurang optimalnya tugas pengawasan kepada pihak manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Independen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Oktafian (2015) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi empiris pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013).

Pengaruh Kompensasi Eksekutif (KE) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari analisis regresi untuk variabel Kompensasi Eksekutif diketahui bahwa koefisien regresi bernilai negatif sebesar

1,471. Hasil uji t untuk variabel Kompensasi Eksekutif diperoleh nilai -4,562 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dikarenakan besar kecilnya kompensasi yang diterima oleh eksekutif dapat memotivasi pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat disebabkan adanya keperluan pribadi pihak eksekutif. Termotivasinya pihak eksekutif juga dikarenakan kurangnya komitmen, loyalitas, dan rendahnya integritas yang dimiliki. Sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan untuk memiliki system tata Kelola yang lebih baik.

Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi untuk variabel Kepemilikan Institusional diketahui bahwa koefisien regresi bernilai negatif sebesar 2,927. Hasil uji t untuk variabel Kepemilikan Institusional diperoleh nilai -2,552 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan ($0,023 < 0,05$). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dikarenakan pemilik institusional diduga mempercayakan semua pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ada tidaknya *tax avoidance*. Diduga juga pemilik institusional tidak terlibat secara aktif dalam jalannya operasional perusahaan.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Oktafian (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

(Studi empiris pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2013)” dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik (PUB) terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis regresi untuk variabel Kepemilikan Saham Publik diketahui bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,755. Hasil uji t untuk variabel Kepemilikan Saham Publik diperoleh nilai 1,135 dengan tingkat signifikan lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan ($0,276 > 0,05$). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *tax avoidance* diduga karena pemilik saham publik tidak terlibat secara aktif terhadap jalannya operasional perusahaan. karena semakin tinggi proporsi kepemilikan saham publik maka dapat memotivasi jalannya sistem pengelolaan perusahaan dan memotivasi dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* berdasarkan proporsi komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independent, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan kepemilikan saham publik terhadap adanya upaya *tax avoidance* dalam perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan uji analisis deskriptif,

normalitas, dan regresi linier berganda. Berdasarkan dari hasil uji penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Adhelia dengan judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)”.
2. Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan auditor oleh KAP BIG FOUR berfokus pada audit laporan keuangan dengan tujuan memastikan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standart akuntansi keuangan sehingga dapat mengetahui apabila ada kecurangan dalam pajak.
3. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Oktafian (2015).
4. Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan besar kecilnya kompensasi yang diperoleh oleh eksekutif dapat memotivasi pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan.
5. Bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Wasito dengan judul penelitian “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI) tahun 2014-2016”.

6. Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham publik dapat memotivasi baiknya system pengelolaan perusahaan dan memotivasi dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya sampel penelitian yang disebabkan oleh sedikitnya perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah dan tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu 2016-2018.
2. Periode penelitian yang terbilang cukup singkat yakni hanya berjalan selama 3 periode yaitu periode 2016, 2017, dan 2018.
3. Penelitian yang dilakukan hanya terfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan perpajakan yang lebih tegas agar tidak ada upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan wajib pajak lebih dapat mentaati peraturan perpajakan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah tahun pengamatan, menggunakan perusahaan yang menggunakan mata uang asing lalu dikonversikan ke rupiah, dan dapat menambah ilmu pengetahuan

tentang *tax avoidance* dan *corporate governance* beserta menambah variable independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan selain sektor pertambangan agar dapat diketahui tingkat upaya *tax avoidance* tiap sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhelia, Dita. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. Diakses pada 19 Februari 2020
- Amalia, Silvia dan Aditya Septiani. 2018. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. Diponegoro *Journal of Accounting* Volume 7, Nomor 4. Universitas Diponegoro. Diakses pada 19 Februari 2020
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Kuntansi dan Auditing* Vol. 8 No. 2. Diakses pada 19 Februari 2020
- Anonim. Undang-undang No. 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Diakses pada 22 Februari 2020
- _____. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses pada 22 Februari 2020

- _____. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada 22 Februari 2020
- _____. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada 22 Februari 2020
- Aprianto, Muhammad dan Susi Dwimulyani. 2019. *Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019 Buku 2 : Sosiasl Dan Humaniora. Diakses pada 13 Mei 2020
- Cahyono, Deddy Dyas dkk. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013*. Journal Of Accounting, Vol. 2 No. 2. Diakses pada 13 Mei 2020
- Carajadikaya.com. “Pengertian, Tujuan Dan Manfaat Perusahaan Go Public” <https://carajadikaya.com/pengertian-tujuan-dan-manfaat-perusahaan-go-public/> (diakses pada 16 Mei 2020)
- Damayanti, F. 2015. *Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan retrun on assets terhadap tax avoidance*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015. Diakses pada 18 Mei 2020
- Diantari, Putu Rista dan IGK Agung Ulupu. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1. Diakses pada 22 Mei 2020
- Janie, Dyah Nurmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif dan Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang : Semarang University Press. Diakses pada 22 Mei 2020
- Mulyani, Sri dkk. 2018. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1. Diakse pada 22 Mei 2020. Diakses pada 19 Mei 2020
- Swingly, C., & Sukartha, I. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,10(1), 47-62. Diakses pada 25 Mei 2020
- Tony Wijaya. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Terori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Diakses pada 25 Mei 2020
- Winata, F. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. Tax & Accounting Review, 4(1), 162. Diakses pada 25 Mei 2020
- Wolfensohn, J. 1999. *Corporate Governance*. Financial Times. Diakses pada 26 Mei 2020
- Xynas. 2011. *EffectiveTax Rates and The “Industrial Policy” Hypotesis:evidence from Malaysia*. Journal of International Accounting, Auditing, Auditing and

Taxation,45-62. Diakses pada 26
Mei 2020

www.idx.com

www.depkeu.go.id

www.kompas.com

www.pajak.go.id

www.kemenkeu.go.id